

## **ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH**

Meilani Bekti Hartanti<sup>1</sup>, Septi Puji Astuti<sup>2</sup>, Sutrisno<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang

<sup>1</sup>meilani.bekti6@admin.sd.belajar.id, <sup>2</sup>septi.puji116@admin.sd.belajar.id,

<sup>3</sup>sutrisno@upgris.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the implementation and impact of education subsidy policies for low-income communities in an effort to increase equitable access to education. The method used is a qualitative approach with a literature study type of research, which utilizes various sources such as scientific journals, books, government reports and relevant policy documents. Data were analyzed descriptively through a process of assessment, grouping and interpretation to obtain a comprehensive picture. The research results show that the education subsidy policy in Indonesia has been implemented through various programs, such as School Operational Assistance (BOS), Smart Indonesia Card (KIP), scholarship programs, and higher education subsidies, which in general are able to increase access to education for low-income people. This is characterized by increasing school enrollment rates and decreasing school dropout rates. However, policy effectiveness still faces a number of obstacles, including inaccurate targeting of aid recipients, uneven distribution, and weak monitoring and data collection systems. In addition, the impact of policy is more dominant in increasing access rather than quality of education. Therefore, improvements are needed in the implementation aspect so that education subsidy policies can run more optimally and sustainably.*

*Keywords: education subsidies, low income communities, access to education*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan serta dampak kebijakan subsidi pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam upaya meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur, yang memanfaatkan berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, serta dokumen kebijakan yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif melalui proses pengkajian, pengelompokan, dan interpretasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pendidikan di Indonesia telah diimplementasikan melalui berbagai program, seperti , Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program beasiswa, serta subsidi pendidikan tinggi, yang secara umum mampu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka

partisipasi sekolah dan menurunnya angka putus sekolah. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, distribusi yang belum merata, serta lemahnya sistem pengawasan dan pendataan. Selain itu, dampak kebijakan lebih dominan dalam meningkatkan akses dibandingkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam aspek implementasi agar kebijakan subsidi pendidikan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** subsidi pendidikan, masyarakat berpenghasilan rendah, akses pendidikan.

### **A. Pendahuluan**

Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial secara berkelanjutan. Menurut (Mahendra, 2025) menyatakan bahwasanya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan pendidikan yang layak. Menurut (Rohman & Madura, 2026) Ketimpangan akses ini terutama dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi biaya maupun keterbatasan fasilitas pendukung

Keterbatasan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut (Fatmawati et al., 2025) Biaya pendidikan yang meliputi uang sekolah, perlengkapan belajar, hingga biaya tidak langsung seperti transportasi, sering kali menjadi beban yang sulit dipenuhi. Kondisi ini menyebabkan masih tingginya angka putus sekolah serta rendahnya partisipasi pendidikan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara yang dapat diakses secara adil tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Menurut (Raja et al., 2025) Subsidi pendidikan merupakan instrumen kebijakan publik yang berperan dalam mengatasi masalah

ini. Dengan subsidi, pemerintah dapat menyalurkan bantuan kepada keluarga berpenghasilan rendah, sehingga menghilangkan keterbatasan akses pendidikan bagi kelompok-kelompok tertentu.

Sejalan dengan menurut (Fauzia et al., 2026) pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan subsidi pendidikan, seperti bantuan operasional sekolah (BOS), beasiswa, dan program bantuan langsung tunai pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan dan meningkatkan pemerataan akses. Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan ketepatan sasaran dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan.

Menurut (Tinggi et al., 2025) implementasi kebijakan subsidi pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah terkait dengan ketepatan sasaran penerima bantuan, di mana masih ditemukan kasus penerima yang tidak sesuai dengan kriteria, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum sepenuhnya terjangkau. Selain itu,

Menurut (Siregar et al., 2025) efektivitas subsidi dalam meningkatkan kualitas pendidikan juga masih menjadi perdebatan, karena bantuan yang diberikan cenderung lebih berfokus pada aspek akses daripada peningkatan mutu pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana kebijakan subsidi pendidikan dilaksanakan serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "*Analisis Kebijakan Subsidi Pendidikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*" penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif terkait efektivitas, tantangan, serta upaya perbaikan kebijakan subsidi pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

(Budiman et al., 2026) Kebijakan subsidi pendidikan merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk

mengurangi biaya yang ditanggung masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan. Subsidi dapat berupa bantuan langsung kepada siswa maupun dukungan operasional kepada lembaga pendidikan.

(Siregar et al., 2025) Kebijakan subsidi pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah, agar tetap dapat mengakses layanan pendidikan. Subsidi ini dapat berupa bantuan keuangan, beasiswa, atau pengurangan biaya pendidikan yang bertujuan untuk meringankan beban perekonomian, meningkatkan pemerataan kesempatan belajar, dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Secara sederhananya, bahwa kebijakan subsidi pendidikan merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi beban biaya pendidikan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui berbagai bentuk bantuan seperti beasiswa dan dukungan operasional. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan, mewujudkan keadilan

sosial, serta menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi.

(Susanto et al., 2025) kebijakan subsidi pendidikan mempunyai peran penting dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utamanya adalah ketidaktepatan sasaran, dimana bantuan subsidi tidak selalu diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan karena keterbatasan data atau lemahnya sistem pendataan.

(Tinggi et al., 2025) implementasi kebijakan subsidi pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah terkait dengan ketepatan sasaran penerima bantuan, di mana masih ditemukan kasus penerima yang tidak sesuai dengan kriteria, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum sepenuhnya terjangkau.

Secara sederhananya, bahwa kebijakan subsidi pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan,

namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan utama yang muncul adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, di mana subsidi belum sepenuhnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan akibat keterbatasan dan kelemahan sistem pendataan, sehingga tujuan pemerataan pendidikan belum tercapai secara optimal.

(Sari, 2026) masyarakat berpenghasilan rendah dapat diartikan sebagai individu atau keluarga yang kondisinya terbatas, ditandai dengan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara optimal, sehingga sering kali memerlukan bantuan atau intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidupnya.

(Isanjaya et al., 2026) masyarakat berpendapatan rendah merupakan kelompok masyarakat yang tingkat pendapatannya berada di bawah standar hidup, sehingga mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Secara sederhananya, bahwa masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kelompok individu atau keluarga dengan tingkat pendapatan di bawah standar kebutuhan hidup, sehingga mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kondisi ini menyebabkan mereka sering memerlukan bantuan atau intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidupnya.

## **B. Metode Penelitian**

(Wahhaj et al., 2025) metode *narrative literature review*. *Narrative Literature Review* merupakan bentuk khas dalam suatu penelitian untuk menemukan pengetahuan yang baru. Meninjau, mengkritik, hingga menganalisis suatu topik sampai pada hasil yang bisa memberikan perspektif baru. Penelitian dimulai dengan mencari kata kunci suatu topik yang akan dibahas. Kata kunci tersebut bisa diperluas dengan mencari berbagai referensi dari sumber-sumber yang terpercaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *narrative literature review* yang bertujuan untuk memperoleh

pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan subsidi pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif melalui pengkajian berbagai sumber tertulis yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

(Tinggi et al., 2025) Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai referensi yang kredibel, antara lain jurnal ilmiah terakreditasi, buku teks, laporan resmi pemerintah, serta dokumen kebijakan dan publikasi lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan validitas, reliabilitas, dan relevansi terhadap fokus kajian, sehingga data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

(Mahendra, 2025) Proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara mengkaji, mengelompokkan, serta menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti berupaya mengidentifikasi pola,

kecenderungan, serta temuan-temuan penting yang berkaitan dengan implementasi dan efektivitas kebijakan subsidi pendidikan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi kebijakan yang ada, termasuk kelebihan, kelemahan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih mendalam serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap berbagai sumber ilmiah, kebijakan subsidi pendidikan di Indonesia menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mengatasi hambatan ekonomi yang selama ini menjadi faktor utama rendahnya partisipasi pendidikan pada kelompok tertentu. Secara umum, implementasi

subsidi pendidikan telah memberikan kontribusi positif, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pelaksanaannya

**Tabel 1.1 Hasil Analisis Kebijakan Subsidi Pendidikan**

No	Aspek Kajian	Uraian Hasil
1	Bentuk Kebijakan Subsidi Pendidikan	Meliputi program BOS, KIP, beasiswa, dan subsidi pendidikan tinggi. Subsidi mencakup biaya langsung (SPP) dan tidak langsung (perlengkapan belajar). Bertujuan memperluas akses pendidikan secara inklusif.
2	Dampak Kebijakan Subsidi	Meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah, khususnya di jenjang dasar dan menengah. Namun, dampak terhadap kualitas pendidikan masih belum optimal karena dipengaruhi faktor lain seperti sarana, kompetensi guru, dan pengelolaan pembelajaran.

3	Tantangan Implementasi	Ketidaktepatan sasaran penerima, kurangnya transparansi dan pengawasan, distribusi bantuan belum merata, serta keterbatasan data ekonomi masyarakat yang akurat.
4	Upaya Perbaikan Kebijakan	Perlu penguatan sistem data berbasis teknologi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, evaluasi berkala, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Berdasarkan tabel hasil analisis kebijakan subsidi Pendidikan diatas dapat dijelaskan bahwasanya:

1. Bentuk Kebijakan Subsidi Pendidikan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pendidikan di Indonesia diwujudkan dalam berbagai bentuk program yang dirancang untuk menjangkau seluruh jenjang pendidikan. Beberapa bentuk subsidi yang umum diterapkan antara lain

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program beasiswa bagi siswa kurang mampu, Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta subsidi biaya pendidikan tinggi. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pengurangan biaya langsung seperti uang sekolah, tetapi juga membantu mengatasi biaya tidak langsung seperti perlengkapan belajar dan kebutuhan penunjang lainnya. Dengan demikian, subsidi pendidikan berperan sebagai instrumen strategis dalam memperluas akses pendidikan secara lebih inklusif.

## 2. Dampak Kebijakan Subsidi

Dari sisi dampak, kebijakan subsidi pendidikan terbukti memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, kebijakan ini juga berkontribusi dalam menekan angka putus sekolah serta meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok marginal. Masyarakat yang sebelumnya

mengalami keterbatasan ekonomi kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa dampak kebijakan terhadap peningkatan kualitas pendidikan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor lain yang turut memengaruhi kualitas pendidikan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kompetensi tenaga pendidik, serta pengelolaan pembelajaran di sekolah. Dengan kata lain, subsidi pendidikan lebih efektif dalam meningkatkan akses dibandingkan mutu pendidikan

## 3. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun memiliki dampak positif, pelaksanaan kebijakan subsidi pendidikan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, di mana masih terdapat penerima yang

tidak sesuai kriteria, sementara kelompok yang benar-benar membutuhkan belum sepenuhnya terjangkau. Selain itu, kurangnya transparansi dan pengawasan dalam penyaluran dana juga menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Permasalahan lain yang muncul adalah distribusi bantuan yang belum merata antar wilayah, serta minimnya data yang akurat terkait kondisi ekonomi masyarakat. Keterbatasan data ini menyebabkan proses penyaluran bantuan menjadi kurang optimal dan berpotensi menimbulkan ketimpangan baru dalam akses pendidikan

#### 4. Upaya Perbaikan Kebijakan

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan subsidi pendidikan, diperlukan berbagai upaya perbaikan yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah penguatan sistem pendataan yang lebih akurat, terintegrasi, dan berbasis teknologi, sehingga penyaluran bantuan

dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel guna meminimalisasi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Evaluasi berkala terhadap program subsidi juga menjadi hal yang penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan memberikan dampak yang diharapkan. Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa kebijakan subsidi pendidikan dilaksanakan melalui berbagai program yang dirancang untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta berbagai jenis beasiswa, serta subsidi pendidikan tinggi. Selaras dengan pendapatnya

menurut (Siregar et al., 2025) kebijakan subsidi pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah, agar tetap dapat mengakses layanan pendidikan. Subsidi ini dapat berupa bantuan keuangan, beasiswa, atau pengurangan biaya pendidikan yang bertujuan untuk meringankan beban perekonomian, meningkatkan pemerataan kesempatan belajar, dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Serta selaras juga dengan pendapatnya menurut (Budiman et al., 2026) Kebijakan subsidi pendidikan merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk mengurangi biaya yang ditanggung masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan. Subsidi dapat berupa bantuan langsung kepada siswa maupun dukungan operasional kepada lembaga pendidikan.

Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui mekanisme penyaluran bantuan baik secara langsung kepada peserta didik maupun melalui satuan pendidikan. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih dijumpai

sejumlah hambatan, salah satunya adalah belum tepatnya penentuan sasaran penerima bantuan, distribusi bantuan yang belum merata, serta lemahnya sistem pengawasan dan pendataan. Sesuai dengan pendapatnya menurut (Susanto et al., 2025) kebijakan subsidi pendidikan mempunyai peran penting dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utamanya adalah ketidaktepatan sasaran, dimana bantuan subsidi tidak selalu diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan karena keterbatasan data atau lemahnya sistem pendataan. Serta selaras dengan pendapatnya (Tinggi et al., 2025) implementasi kebijakan subsidi pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan yang kerap terjadi berkaitan dengan akurasi dalam penentuan pihak yang berhak menerima bantuan, di mana masih ditemukan kasus penerima yang tidak sesuai dengan kriteria, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum sepenuhnya terjangkau.

Sementara itu, dari sisi dampak, kebijakan subsidi pendidikan

menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah, menurunnya angka putus sekolah, serta semakin terbukanya kesempatan bagi kelompok marginal untuk memperoleh pendidikan. Sejalan dengan pendapatnya menurut menurut (Raja et al., 2025) menyatakan bahwasanya Subsidi pendidikan merupakan instrumen kebijakan publik yang berperan dalam mengatasi masalah ini. Dengan subsidi, pemerintah dapat menyalurkan bantuan kepada keluarga berpenghasilan rendah, sehingga menghilangkan keterbatasan akses pendidikan bagi kelompok-kelompok tertentu.. Meskipun demikian, dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan belum sepenuhnya optimal, karena masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti sarana prasarana dan kompetensi tenaga pendidik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan subsidi pendidikan telah dilaksanakan secara luas dan memberikan dampak nyata

terutama dalam aspek pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal ketepatan sasaran, pemerataan distribusi, serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan.

### **E. Kesimpulan**

Kebijakan subsidi pendidikan di Indonesia telah dilaksanakan melalui berbagai program seperti BOS, KIP, beasiswa, dan subsidi pendidikan tinggi, yang terbukti mampu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ditandai dengan meningkatnya partisipasi sekolah dan menurunnya angka putus sekolah.

Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala seperti ketidaktepatan sasaran, distribusi yang belum merata, serta lemahnya pengawasan. Selain itu, kebijakan ini lebih berdampak pada pemerataan akses dibandingkan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pendataan, pengawasan, dan evaluasi agar kebijakan subsidi

pendidikan dapat berjalan lebih optimal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Q., Mouton, S., Veenhoff, L., & Boersma, A. (2026). ANALISIS DAMPAK KOMERSIALISASI PENDIDIKAN & STRATEGI INKLUSIVITAS PADA SEKOLAH DASAR DI WILAYAH URBAN. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(0.1101/2021.02.25.432866), 1–15.
- Fatmawati, F., Fadillah, N., Faizi, A., & Kurnia, H. (2025). Kebijakan Pemerintah Untuk Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Innovations in Multidisciplinary Education Journal*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.61476/q1dfs358>
- Fauzia, S., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2026). Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional di Indonesia Ekonomi Politik Anggaran. 2, 241–247.
- Isanjaya, A. K., Astuti, W., & Andini, I. (2026). Kesesuaian Karakteristik Rusunawa-rusunawa di Kecamatan Cakung Jakarta Timur terhadap Preferensi Masyarakat Berpenghasilan Rendah The Suitability of the Characteristics of Rusunawa in Cakung District , East Jakarta to the Preferences of Low-Income Communi. 8(1), 26–40.
- Mahendra, E. (2025). Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Berbasis Maqashid Syariah. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 25(1), 18–35.
- Raja, A. M. L., Nababan, A. A., Ayudis, D., Aulia, D., & Lubis, L. N. (2025). Peran Subsidi Pendidikan dalam Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2665–2670. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3552>
- Rohman, A., & Madura, U. T. (2026). Analisis Tingkat Kepuasan Pembeli KPR Syariah Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Program BP2BT ( Studi Kasus PT . Wiss Bangun Persada Mojokerto ). 2(4), 174–184.
- Sari, D. P. (2026). Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG) dan Aksesibilitas Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 6(1).
- Siregar, N. A., Banjarnahor, E., Siallagan, L. R., Lubis, M. S. bila, & Siregar, R. (2025). Persepsi Mahasiswa tentang Trade-Off Antara Efisiensi Alokasi dan Pemerataan Akses dalam Subsidi Pendidikan.

RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(4), 1954–1961.  
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3792>

Susanto, T. T. D., Agnes Malyka, Harun Fauzi, Najwa Faradisa, Nasywa Rifatul, & Tsabita Malfanda. (2025). Biaya Tersembunyi dan Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Dampak Sosial-Ekonomi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3282–3288.  
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1021>

Tinggi, S., Tarbiyah, I., Ittihadiyah, A., & Utara, L. (2025). Analisis Peran Pendidikan Dalam Mengubah Stratifikasi Sosial Analysis of the Role of Education in Changing Social Stratification. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.*, 5(1), 177–192.

Wahhaj, I. S., Anwar, R. K., & Rukmana, E. N. (2025). Peran Perpustakaan Digital dalam Proses Pembelajaran Digital Natives. *Media Pustakawan*, 32(1), 1–14.  
<https://doi.org/10.37014/medpus.v32i1.5349>